

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tugas pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya dan dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu menyediakan informasi kepada publik salah satunya kepada yang membutuhkan mengenai informasi laporan keuangan sebagai salah satu tolak ukur kinerja pemerintah.

Informasi laporan keuangan contohnya yang menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah Pengelolaan pemerintahan, Hal ini dirasa sangat penting karena hal tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi atas segala kinerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 32, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Laporan Keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap pemasukan dan penggunaan dari dana tersebut harus dicatat, dilaporkan dalam laporan keuangan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan pemeriksa, yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menyatakan bahwa laporan audit dan keuangan telah menyajikan data secara wajar. Semua hal yang berhubungan dengan material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tertentu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberlakukan di Indonesia.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam opini ini, auditor akan memberikan pendapat bahwa secara umum, laporan audit dan keuangan yang disajikan sudah wajar. Namun, dari semua hal yang material, terdapat suatu penyimpangan atau kekurangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan.
3. Tidak Wajar. Dalam opini tidak wajar, pendapat yang diberikan oleh auditor ketika laporan keuangan yang diterima secara keseluruhan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
4. Tidak Memberikan Pendapat. Dalam opini ini, auditor merasa bahwa ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan IAI. Dalam pembuatan laporannya, auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak dapat memberikan pendapat.

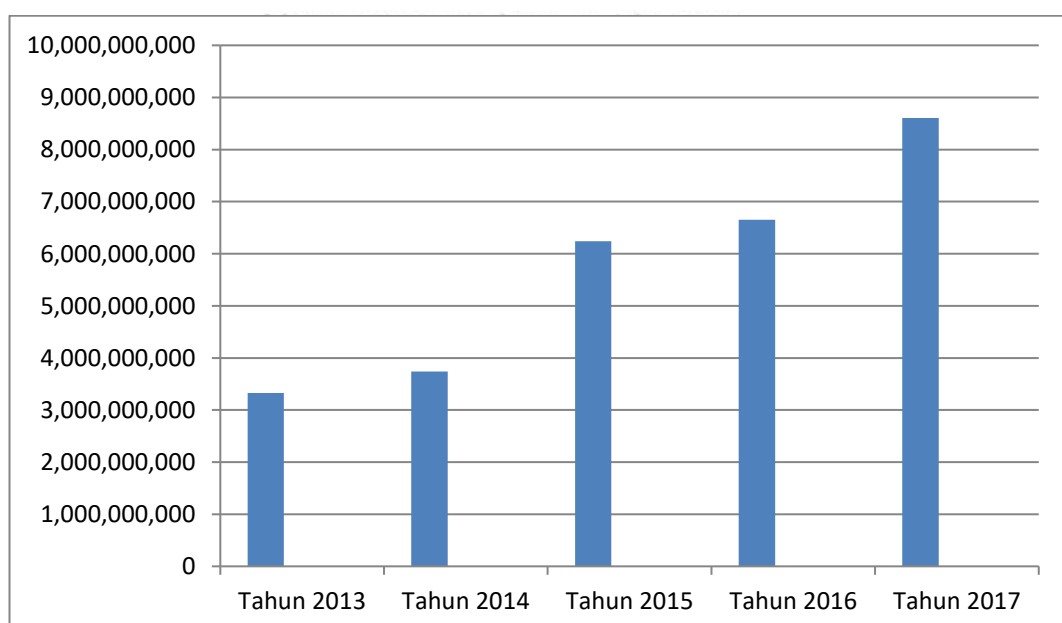
Berdasarkan Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2017 Provinsi Jawa Barat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2013-2017 masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Dimana WDP merupakan opini dari BPK yang menjelaskan bahwa LKP

yang disajikan sudah wajar, namun terdapat suatu penyimpangan atau kekurangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan.

BPK selain mengeluarkan hasil pemeriksaannya, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa, dalam terbitannya tersebut BPK menemukan adanya beberapa kelemahan SPI. Dengan adanya penemuan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. Temuan-temuan BPK tersebut, membuat laporan keuangan yang dihasilkan LKPD Kota Bandung dari tahun 2013-2017 masih belum sesuai harapan. Salah satu temuan tersebut terkait dengan pengelolaan atas sewa tanah dan bangunan.

Gambar 1.1.

**Grafik Data Piutang Sewa Tanah Dan Bangunan
Kota Bandung**



Keterangan :

Tahun 2013 Piutang sebesar Rp. 3.325.407.757

Tahun 2014 Piutang sebesar Rp. 3.742.182.819

Tahun 2015 Piutang sebesar Rp. 6.242.110.574

Tahun 2016 Piutang sebesar Rp. 6.651.761.514

Tahun 2017 Piutang sebesar Rp. 8.605.632.245

Dilihat dari masalah tersebut, terlihat bahwa jumlah piutang setiap tahunnya meningkat, BPKA mengalami permasalahan keuangan yang menyangkut aset lancar (piutang) dalam penagihan sewa tanah dan bangunan, jelas hal ini merugikan karena seharusnya pendapatan Kota Bandung sendiri dapat lebih tinggi.

Berdasarkan temuan-temuan BPK di atas, dapat diartikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih ada permasalahan dalam proses Sistem Pengendalian Internal. Hal ini mengidentifikasi masih banyak ditemukan ketidakberesan, ketidakbenaran dan bahkan penyimpangan dalam Pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya penagihan sewa tanah dan bangunan yang dikelola dan dilaporkan tidak sesuai harapan dalam laporan keuangan, yang pada ujungnya berimbas pada laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Penagihan Piutang Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
2. Meningkatnya jumlah piutang sewa tanah dan bangunan setiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dimensi dari sistem pengendalian internal terhadap efektivitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi dari sistem pengendalian internal terhadap efektivitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara parsial.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara simultan

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada dua jenis kegunaan penelitian yang penulis kemukakan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, khususnya mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektifitas Penagihan Piutang.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi.

Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada pegawai atau pelaksana Pengelolaan keuangan dan aset Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemerintahan seyogyanya mereka memberikan jasa kepada masyarakat dan juga mengelola aset daerah maupun negara. Dalam mengelola aset tersebut, pemerintah berorientasi laba (profit oriented organization) mempunyai perhatian besar terhadap bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Untuk menjaga aset tersebut dan tercapainya tujuan daerah, maka perlu satu penanganan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik dalam mengelola ini didukung oleh perencanaan, kebijakan, prosedur, pendelagasian wewenang, metode-metode dan standar-standar pelaksanaan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. Pengendalian internal merupakan kegiatan yang digunakan untuk memastikan tujuan dan sasaran organisasi tercapai dan merupakan alat bantu bagi pemerintah dalam pencapaian tujuan tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh COSO dalam Arens (2008:375) pengertian sistem pengendalian internal sebagai berikut :

internal control is a process, effected by an entity's board pf directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance

Terdapat 5 komponen dari sistem pengendalian internal ini menurut COSO (2013:4), yakni :

1. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian)
2. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring Activities* (Kegiatan Pemantauan)

Penerapan pengendalian internal ini yakni untuk mengamankan, mengawasi dan melindungi catatan maupun aktiva keuangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah salah satunya berupa piutang usaha. Piutang merupakan unsur yang paling penting dalam neraca perusahaan atau pemerintahan. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang ini penting, bukan saja untuk keberhasilan perusahaan atau pemerintah, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan para pelanggan.

Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. Diharapkan dengan meningkatnya sewa tanah dan bangunan di kota bandung, maka pendapatan asli daerah dapat meningkat. Pemerintah atau perusahaan yang memiliki jumlah piutang yang cukup besar dapat mengendalikan piutangnya dengan baik karena risiko yang terkandung didalamnya cukup besar yaitu kemungkinan tidak tertagihnya piutang, sehingga pendapatan daerah

mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu adanya siste pengendalian internal terhadap piutang tersebut.

Sistem pengendalian internal akan memadai apabila diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Pengendalian internal yang memadai dapat memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat didalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian yang memadai atas pengelolaan penagihan piutang usaha akan menjamin bahwa hasil penagihan piutang disetorkan dengan tepat waktu.

Bagian penagihan adalah bagian kritis dan merupakan salah satu penentuan kinerja dari suatu instansi, karena penagihan adalah suatu proses dimana piutang akan dikonversikan menjadi satuan uang. Uang hasil tersebut nantinya akan menjadi pendapatan bagi pemerintah dan dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah pada kurun waktu tersebut.

Mahmudi (2011:84) memberikan pengertian efektivitas yakni “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.”

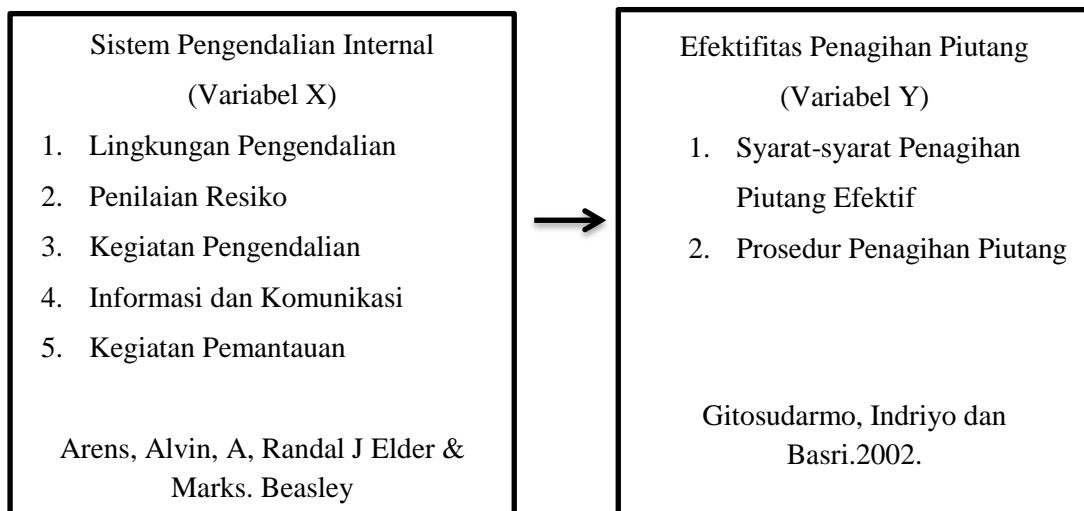
Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas cenderung pada pencapaian suatu hasil yang berkaitan dengan keberhasilan suatu perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuannya, atau suatu hubungan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. Pengendalian yang dilakukan secara teratur dan konsisten yang dilakukan

pemerintah akan dapat mengurangi kerugian instansi, dengan demikian jika instansi melakukan pengendalian pada bagian penagihan tentu akan berpengaruh terhadap jumlah penagihannya sehingga pendapatan yang diterima pun akan lebih efektif. Karena dengan pengendalian yang baik tentu akan mengurangi kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan ataupun bekerja dengan asal-asalan yang akan berakibat pada jumlah penagihan itu sendiri.

Pengendalian yang baik yang dilaksanakan oleh instansi itu sendiri, akan meminimalisasi kerugian yang timbul akibat adanya kerugian piutang tak tertagih ataupun kecurangan yang dilaksanakan oleh karyawannya sendiri. Semakin baik pengendalian tersebut, maka akan semakin besar instansi dapat menagih jumlah tagihan yang direncanakan sebelumnya. Dari uraian tersebut sangat erat kaitannya pengendalian piutang yang baik yang dilaksanakan oleh instansi sangat berhubungan erat dengan efektivitas penagihan piutang dalam suatu instansi.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

**Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Bandung**



1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho = 0$, tidak terdapat pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara parsial
 $H_a : \rho \neq 0$, terdapat pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara parsial
2. $H_0 : \rho = 0$, tidak terdapat pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara simultan
 $H_a : \rho \neq 0$, terdapat pengaruh dimensi sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penagihan piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung secara simultan